DAFTAR RENCANA KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI
PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2023

NO	PERDA/PERBUP	KETERANGAN
1.	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Terbitnya Permensos No. 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	Terbitnya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kebumen, 26 Januari 2023
ANALIS HUKUM AHLI MUDA

NUR KHOTIMAH, S.H., M.H.
Penata Tk. I
NIP. 19761029 201001 2 006

DAFTAR PRODUK HUKUM DAERAH

YANG TELAH DIANALISIS DAN EVALUASI TAHUN 2023

NO	PERDA/PERBUP	KETERANGAN
1.	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Perlu dikuatkan dengan Peraturan Daerah
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	Perlu diubah

Kebumen, 22 Agustus 2023

ANALIS HUKUM AHLI MUDA

NUR KHOTIMAH, S.H., M.H.

Penata Tk. I

NIP. 19761029 201001 2 006

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
SEKRETARIAT DAERAH
Jln. Merdeka No.2 Kebumen Telp. (0287) 381144, 381410, 381205
Fax. (0287) 381423 *email: bagianumum.setdakebumen@gmail.com*
Website www.kebumenkab.go.id Kode Pos: 54311

LAPORAN

KEGIATAN ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH TAHUN 2023

I. PENDAHULUAN

Peraturan perundang-undangan memiliki sifat yang dinamis, dimana perubahan terhadap suatu Peraturan Perundang-undangan sejatinya dimaksudkan untuk mengakomodasi perkembangan hukum dan kebutuhan hukum sesuai dengan dinamika perubahan dalam masyarakat. Dalam rangka menuju reformasi produk hukum di daerah, perlu adanya upaya pengkajian suatu produk hukum di wilayah Kabupaten Kebumen melalui kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah yang tata caranya diatur dalam Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07. Kegiatan analisis dan evaluasi bertujuan untuk identifikasi persoalan terkait objek analisis dan evaluasi baik disebabkan dinamika regulasi, efektifitas pelaksanaan peraturannya maupun kebutuhan pengaturan lainnya yang diharapkan dapat menjadi bahan masukan perbaikan produk hukum daerah Kabupaten Kebumen.

II. PEMBAHASAN

Produk hukum yang menjadi objek kajian dalam kegiatan Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen.

III. HASIL DAN REKOMENDASI

Hasil kegiatan Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah adalah sebagai berikut:

No.	Produk Hukum	Dimensi	Hasil Analisis dan Evaluasi	Rekomendasi
1.	Peraturan Bupati Kebumen Nomor 36 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan	Efektivitas Peraturan	Keberadaan perusahaan yang secara langsung menjalankan aktivitas ekonomi memberikan dampak luas terhadap masyarakat dan lingkungan tempat tinggalnya sehingga kepedulian dan komitmen masyarakat untuk menyeimbangkan fungsi ekonomi mereka dalam pembangunan mendesak dilakukan. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, melainkan memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelangsungan lingkungan hidup yang terdampak atas aktivitas Perusahaan. Meski tanggung jawab sosial dan lingkungan telah diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan sudah diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 36 Tahun 2015, namun efektivitas pengelolaan dan kontribusinya terhadap	Perlu diatur Peraturan Daerah tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagai instrumen yang memperkuat perusahaan yang sudah melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kontribusinya dalam pembangunan daerah, serta mendorong perusahaan yang belum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan untuk memberikan kepedulian dan komitmennya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan di dalam dan/atau sekitar perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi,

			pembangunan di Kabupaten Kebumen masih memerlukan dukungan kebijakan yang lebih kuat dengan mendasar pada materi muatan Permensos No. 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha dan peraturan lain di atasnya.	seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat guna terciptanya pembangunan yang merata dan berkelanjutan.
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen	Disharmoni Pengaturan	Lahirnya PP No. 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP No. 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengacu tentang Pemerintahan Daerah, bahwa hubungan kerja antara DPRD dan Kepala Daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar. Untuk itu perlu kiranya melakukan penyesuaian kendaraan dinas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD sebagai kendaraan perorangan dinas.	Perlu dilakukan perubahan terkait sinkronisasi kendaraan perorangan dinbas yang digunakan oleh Pimpinan DPRD, pemindahtanganan kendaraan perorangan dinas yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintah daerah, dan pembatasan jangka waktu pengembalian rumah negara dan kendaraan perorangan dinas sebagaimana amanat PP No. 1 Tahun 2023.

IV. PENUTUP

Demikian hasil kegiatan Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum Daerah Tahun 2023. Rekomendasi ini kami sampaikan semoga mendapat perhatian dan dapat ditindaklanjuti.

Kebumen, 22 Agustus 2023

Yang melaporkan,

ANALIS HUKUM AHLI MUDA

NUR KHOTIMAH, S.H., M.H.
Penata Tk. 1
NIP. 19761029 201001 2 006